

Nama : Feby Yolanda S

NPM : 2313031068

Kelas : 2023 C

Mata Kuliah : Ekonomi Pendidikan

## Jawaban UAS

### Soal 1 – Efisiensi Anggaran Pendidikan

Kasus Pemerintah Kabupaten A mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 30% dari APBD. Sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan gedung sekolah baru, sedangkan pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan pengadaan media pembelajaran digital masih sangat terbatas. Setelah lima tahun, angka partisipasi sekolah meningkat, tetapi kualitas hasil belajar siswa tidak mengalami peningkatan signifikan.

#### Pertanyaan

1. Analisis penggunaan anggaran pendidikan pada kasus tersebut berdasarkan konsep efisiensi internal dan eksternal pendidikan.

#### Jawaban :

alokasi 30% APBD Kabupaten A yang didominasi oleh pembangunan fisik merupakan ilusi keberhasilan kebijakan pendidikan yang terjebak pada fetisisme infrastruktur, sehingga sepenuhnya gagal mewujudkan efisiensi riil. Dalam kacamata teori ekonomi pendidikan, kita tidak bisa hanya melihat *input* finansial tanpa mengukur efektivitas konversinya menjadi *output* kognitif. Secara efisiensi internal yang mengukur sejauh mana sistem meminimalkan pemborosan sumber daya untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kebijakan ini sangat tidak efisien. Anggaran tersedot untuk benda mati (gedung), sementara variabel *input* terpenting seperti kapabilitas guru dan inovasi pedagogik dibiarkan terbelakang. Peningkatan angka partisipasi di sini hanyalah kenaikan kuantitas semu; stagnasi hasil belajar

membuktikan adanya disfungsi dalam proses transformasi pembelajaran. Secara efisiensi eksternal, kondisi ini jauh lebih fatal. Teori *Human Capital* klasik berasumsi bahwa tambahan tahun bersekolah otomatis meningkatkan produktivitas agregat, namun kasus ini dengan keras membantahnya. Tanpa adanya penguasaan kompetensi riil, sekolah di Kabupaten A gagal membekali siswa agar relevan dengan tuntutan pasar tenaga kerja maupun kebutuhan sosial. Institusi pendidikan akhirnya tidak menciptakan nilai tambah SDM, melainkan hanya berfungsi sebagai instrumen *Screening* atau *Signaling* kosong, di mana ijazah nantinya sekadar menjadi carik kertas penanda kelulusan tanpa substansi keahlian produktif di dunia nyata.

2. Jelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas sumber daya manusia. Berikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Jawaban :

Kebijakan populis berbasis proyek fisik ini membawa dampak struktural yang destruktif terhadap kualitas SDM, karena menciptakan pemerataan semu yang justru melanggengkan ketimpangan sosial-ekonomi. Berdasarkan bukti empiris secara historis di Indonesia, seperti pada era ekspansi SD Inpres penyediaan akses secara masif yang tidak diiringi dengan peningkatan mutu guru hanya akan melahirkan learning poverty (kemiskinan pembelajaran). Secara analisis dampak distributif, kebijakan ini seolah-olah menguntungkan kelompok miskin atau perdesaan dengan memberi mereka gedung sekolah baru. Namun, pada praktiknya, mereka tetap terjebak dalam layanan berkualitas rendah. Sebaliknya, kelompok menengah ke atas akan dengan mudah mengompensasi kelemahan sekolah ini dengan membeli layanan pendidikan privat (bimbingan belajar) yang mahal, sehingga keadilan vertikal justru semakin terkoyak. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan alternatif saya adalah recalibrasi APBD secara radikal: pemerintah harus memberlakukan moratorium pembangunan fisik gedung sekolah yang tidak mendesak, dan menggeser mayoritas anggaran modal (Capex) menjadi anggaran peningkatan mutu guru yang terukur. Intervensi berbasis perangkat lunak pendidikan (software), seperti pelatihan kompetensi digital guru dan pemberian insentif berbasis kinerja hasil belajar siswa, memiliki cost-benefit ratio yang jauh

lebih tinggi dan lebih realistis untuk mendongkrak capaian kognitif. Sebagai penutup dari ironi kebijakan publik ini, satu pertanyaan kritis patut kita renungkan bersama: Apakah obsesi masif pemerintah daerah terhadap pembangunan gedung fisik selama ini benar-benar lahir dari niat mulia memajukan SDM, atau jangan-jangan hanyalah ruang 'rent-seeking' (perburuan rente) untuk membagi-bagikan proyek pengadaan demi kepentingan ekonomi-politik jangka pendek elit lokal?

## Soal 2 – Ketimpangan Akses Pendidikan

Kasus Sekolah di wilayah perkotaan memiliki laboratorium lengkap, akses internet cepat, dan guru profesional. Sebaliknya, sekolah di daerah pedesaan mengalami kekurangan guru, fasilitas minim, dan keterbatasan teknologi. Akibatnya, hasil ujian siswa di desa jauh lebih rendah dibandingkan siswa di kota.

### Pertanyaan

1. Jelaskan bentuk ketimpangan pendidikan pada kasus tersebut.

### Jawaban :

Meneueurt pendapat saya disparitas antara sekolah perkotaan dan pedesaan dalam kasus ini bukanlah sekadar kebetulan geografis, melainkan bentuk nyata dari diskriminasi spasial sistemik dan kegagalan struktural negara dalam menjamin pemerataan input pendidikan. Jika kita menggunakan kacamata Teori Kritis dan pandangan Institusionalis (seperti teori reproduksi sosial dari Bourdieu atau Bowles & Gintis), sistem pendidikan dalam kondisi ini telah beralih fungsi, dari yang seharusnya menjadi *great equalizer* (penyetara kelas sosial), justru bertransformasi menjadi mesin legitimasi ketimpangan. Melalui *Educational Production Function*, kita memahami bahwa *output* (hasil ujian siswa) sangat bergantung pada *input* (fasilitas dan kualitas guru). Ketika wilayah pedesaan mengalami defisit kapital absolut pada *input* kuncinya, maka rendahnya hasil belajar adalah sebuah keniscayaan matematis, bukan kesalahan kognitif siswa. Secara empiris di Indonesia, ketimpangan semacam ini sangat tercermin dalam Rapor Pendidikan dan hasil Asesmen Nasional yang menunjukkan jurang literasi antara sekolah di Pulau

Jawa (pusat urban) dengan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Bahkan, kebijakan sistem Zonasi yang berniat meruntuhkan kasta "sekolah favorit" sering kali gagal menyentuh akar masalah ini, karena infrastruktur dasar dan distribusi guru-guru berkompentensi tinggi tetap terkonsentrasi di perkotaan.

2. Analisis dampak ekonomi jangka panjang dari ketimpangan pendidikan. Usulkan solusi kebijakan untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Jawaban :

Ketimpangan ini menciptakan inefisiensi alokasi talenta (*misallocation of talent*) yang luar biasa fatal bagi perekonomian jangka panjang. Secara analisis dampak distributif, kebijakan yang membiarkan ketimpangan ini jelas menguntungkan dan mensubsidi kelompok kelas menengah-atas di perkotaan yang akan terus memonopoli sektor formal bernilai tambah tinggi (*high-skilled labor*). Sebaliknya, siswa pedesaan akan tersingkir, mengalami depresiasi *human capital*, dan terjebak dalam sektor informal berupah murah. Hal ini tidak hanya memicu kebocoran potensi angkatan kerja nasional yang menurunkan pertumbuhan ekonomi (inefisiensi makro), tetapi juga melanggengkan jebakan kemiskinan antargenerasi (*intergenerational poverty trap*) yang akan memperlebar *Gini ratio*.

Sebagai rekomendasi kebijakan alternatif, negara harus meninggalkan paradigma *equality* (membagi anggaran sama rata) dan beralih pada *affirmative equity* (pendanaan asimetris). Pemerintah harus berani memberikan alokasi dana per kapita yang jauh lebih besar (indeks kemahalan dan kesulitan) bagi sekolah pedesaan. Namun, alih-alih hanya membangun fasilitas fisik, intervensi paling rasional adalah reformasi distribusi guru. Saya mengusulkan skema insentif radikal, misalnya, gaji 2 hingga 3 kali lipat di atas standar UMR serta *fast-track* promosi jabatan bagi guru-guru berprestasi terbaik (PNS/PPPK) yang bersedia mengabdikan minimal 5 tahun di daerah terpencil. Memang, hambatan implementasinya adalah penolakan politis dari birokrasi dan serikat guru perkotaan yang sudah berada di zona nyaman.

### Soal 3 – Pengangguran Terdidik

Kasus Jumlah lulusan perguruan tinggi di Kota B meningkat setiap tahun. Namun, banyak lulusan menganggur atau bekerja tidak sesuai bidang studinya. Dunia industri menilai kompetensi lulusan belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pertanyaan

1. Analisis penyebab pengangguran terdidik berdasarkan teori human capital.

Jawaban :

Posisi saya sebagai mahasiswa memandang fenomena di Kota B sebagai bukti kegagalan sistemik dari komersialisasi dan masifikasi pendidikan tinggi, di mana universitas telah terdegradasi menjadi sekadar "pabrik ijazah" alih-alih kawah candradimuka pembentuk kompetensi. Jika kita membedahnya, penganut teori *Human Capital* ortodoks akan kebingungan melihat kasus ini, karena mereka secara naif berasumsi bahwa setiap tambahan waktu bersekolah (investasi pendidikan) akan otomatis berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas kerja dan jaminan upah. Kasus ini justru membongkar kenaifan tersebut dan membuktikan bahwa pendekatan *Screening* atau *Signaling Theory* dari Spence jauh lebih relevan untuk memotret realitas. Di Kota B, telah terjadi inflasi kredensial (*credential inflation*); ijazah sarjana tidak lagi memberikan sinyal kecerdasan atau produktivitas kepada pasar tenaga kerja, melainkan hanya menjadi prasyarat administratif yang kehilangan makna substantif. Ketika kampus hanya melatih mahasiswa untuk menghafal teori usang tanpa menggunakan instrumen pembelajaran yang melatih nalar kritis dan pemecahan masalahnya seperti perancangan proyek dunia nyata atau *scaffolding* berpikir tingkat tinggi, maka lulusan yang dihasilkan akan gagap saat dihadapkan pada dinamika industri. Akibatnya, gelar sarjana gagal dikonversi menjadi *human capital* yang riil.

2. Jelaskan hubungan antara pendidikan dan pasar kerja pada kasus tersebut. Berikan rekomendasi untuk meningkatkan relevansi lulusan.

Jawaban :

Ketidaksesuaian (*mismatch*) antara *supply* lulusan universitas dan *demand* kompetensi industri pada kasus ini menciptakan tragedi inefisiensi alokasi sumber daya yang masif, baik bagi individu maupun negara. Secara analisis dampak distributif, kelompok yang paling dirugikan adalah mahasiswa dari kelas ekonomi bawah. Bayangkan, banyak dari mereka yang bisa berkuliah murni karena mengandalkan subsidi penuh dari negara atau beasiswa afirmasi, dengan harapan pendidikan menjadi tiket mobilitas vertikal. Namun, ketika mereka lulus dan menjadi pengangguran atau mengalami *underemployment* (bekerja di sektor informal/tidak sesuai kualifikasi), terjadi kebocoran anggaran publik yang fatal, investasi negara hangus tanpa menghasilkan *Social Rates of Return* (tingkat pengembalian sosial) yang diharapkan, sekaligus menghancurkan harapan keluarga miskin tersebut.

Sebagai rekomendasi kebijakan alternatif, pemerintah dan perguruan tinggi tidak bisa lagi merancang kurikulum di "menara gading". Solusi yang rasional adalah mewajibkan integrasi kurikulum secara *co-creation* dengan industri, menuntut mahasiswa melakukan praktik kerja lapangan atau magang non-kependidikan yang berorientasi pada penyelesaian masalah nyata, serta mengoptimalkan sistem evaluasi menjadi berbasis proyek (*Project-Based Learning*). Tentu saja, hambatan terbesar dari implementasi ini adalah kekakuan birokrasi kampus dan ego sektoral tenaga pendidik yang enggan merevisi materi ajarnya agar relevan dengan zaman.

#### Soal 4 – Kenaikan Biaya Pendidikan

Kasus Sebuah universitas swasta menaikkan uang kuliah sebesar 25% untuk meningkatkan fasilitas kampus dan layanan akademik. Kebijakan tersebut mendapat protes dari mahasiswa karena dinilai memberatkan keluarga berpenghasilan rendah.

#### Pertanyaan

1. Analisis kasus tersebut berdasarkan konsep pendidikan sebagai barang publik dan barang privat.

Jawaban :

saya menolak keras rasionalisasi kenaikan biaya sebesar 25% tersebut, karena hal ini merupakan manifestasi nyata dari komodifikasi dan privatisasi pendidikan tinggi yang sangat agresif. Jika kita membedahnya melalui lensa ekonomi publik, pendidikan tinggi sejatinya berada di wilayah abu-abu sebagai *quasi-public good* (barang semi-publik) atau *merit good*. Pendekatan neoliberal ekstrem memang memandang pendidikan tinggi murni sebagai barang privat (*private good*) karena sifatnya yang *excludable* (bisa membatasi akses bagi yang tidak mampu bayar) dan *rivalrous* (kursi di kelas terbatas), sehingga wajar jika mahasiswa menanggung biaya penuh (*cost-sharing*) demi fasilitas. Namun, logika ini sangat cacat karena mengabaikan *positive externalities* (eksternalitas positif). Pendidikan tinggi menghasilkan lulusan yang mendorong inovasi makro, stabilitas demokrasi, dan penerimaan pajak yang lebih tinggi di masa depan yang kesemuanya adalah barang publik (*public good*). Dengan menaikkan biaya secara drastis atas dalih fasilitas, universitas swasta tersebut secara sepihak telah mereduksi makna kampus menjadi sekadar penyedia jasa komersial yang tunduk pada hukum permintaan dan penawaran pasar, sekaligus merampas hakikat sosial dari pendidikan itu sendiri.

2. Jelaskan dampak sosial ekonomi dari kenaikan biaya pendidikan.

Jawaban :

Kenaikan eksesif ini akan memicu dampak sosio-ekonomi yang sangat regresif. Secara analisis dampak distributif, kebijakan ini merupakan pukulan telak yang akan menyingkirkan kelompok mahasiswa dari desil pendapatan menengah ke bawah. Akibatnya, universitas tersebut akan mengalami proses elitisasi, kampus hanya akan diisi oleh mahasiswa berkapital kuat, terlepas dari apakah mereka memiliki kapabilitas akademik yang unggul atau tidak. Bukti empiris fenomena ini sangat sering kita saksikan tidak hanya di perguruan tinggi swasta, tetapi juga dalam polemik komersialisasi status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia yang berlandung di balik otonomi untuk menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Secara efisiensi jangka panjang, hal ini memicu inefisiensi alokasi talenta yang parah. Anak-anak cerdas dari keluarga miskin terpaksa *drop out* atau

mengurungkan niat berkuliah, sehingga mobilitas sosial vertikal mereka terputus. Pada akhirnya, yang terjadi adalah reproduksi kelas sosial: yang kaya semakin mendominasi sektor profesional karena mampu membeli akses fasilitas akademik unggul, sedangkan yang miskin semakin terpinggirkan.

3. Apakah pemerintah perlu melakukan intervensi? Jelaskan alasannya.

Jawaban :

Berangkat dari kegagalan pasar (*market failure*) akibat eksternalitas positif yang terancam hilang tersebut, pemerintah mutlak harus melakukan intervensi. Negara tidak boleh lepas tangan dan membiarkan perguruan tinggi bahkan swasta sekalipun beroperasi layaknya korporasi liar tanpa kontrol harga. Sebagai rekomendasi kebijakan alternatif, pemerintah harus merancang intervensi ganda. Pertama, regulasi *price cap* (batas atas kenaikan) yang diikat dengan kewajiban audit transparansi biaya; universitas harus membuktikan secara rasional bahwa kenaikan 25% tersebut murni untuk investasi mutu pembelajaran, bukan untuk membiayai *overhead* birokrasi kampus atau ekspansi bisnis yayasan. Kedua, jika otonomi kampus tetap dihormati, pemerintah wajib mengekspansi skema perlindungan berlapis, baik melalui pelebaran kuota KIP-Kuliah untuk PTS yang diakreditasi ketat, maupun mewajibkan PTS untuk menerapkan kebijakan subsidi silang yang proporsional bagi minimal 20% kuota mahasiswanya. Sebagai penutup, satu pertanyaan kritis harus kita alamatkan kepada para pemangku kebijakan pendidikan kita: *Jika ruang-ruang akademik dengan fasilitas terbaik hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu membayar mahal, lantas masih pantaskah universitas mengklaim dirinya sebagai agen pencerah peradaban, atau ia sebenarnya telah berubah wujud menjadi klub eksklusif yang memelihara kesenjangan tatanan sosial?*

Soal 5 – Digitalisasi Pembelajaran

Kasus Pasca pandemi, sekolah menerapkan pembelajaran berbasis digital. Namun, siswa dari keluarga kurang mampu mengalami kesulitan membeli perangkat dan kuota internet sehingga partisipasi belajar menurun.

Pertanyaan

1. Analisis masalah tersebut menggunakan konsep biaya pendidikan dan opportunity cost.

Jawaban :

Saya berpendirian tegas dengan memaksakan digitalisasi pendidikan pascapandemi tanpa adanya jaring pengaman infrastruktur dari negara bukanlah sebuah inovasi pedagogik, melainkan sebuah bentuk kejahatan struktural yang mengeksklusi kelompok rentan. Jika kita bedah menggunakan konsep biaya pendidikan, institusi sekolah mungkin merasa telah mencapai efisiensi (menekan biaya operasional fisik), namun yang terjadi sebenarnya adalah *shifting of cost* (pemindahan beban biaya paksa) dari ranah institusi publik ke ranah domestik (privat). Siswa miskin tiba-tiba dipaksa menanggung biaya langsung (*direct private costs*) berupa infrastruktur gawai dan kuota internet yang harganya tidak elastis terhadap pendapatan mereka. Dalam kerangka *opportunity cost* (biaya peluang), situasi ini sangat tragis. Bagi keluarga kelas menengah-atas, *opportunity cost* dari membeli kuota mungkin hanyalah menunda konsumsi tersier (seperti rekreasi). Namun, bagi keluarga prasejahtera, *opportunity cost* dari membeli kuota data demi sekolah daring adalah mengorbankan pemenuhan gizi dasar atau biaya kesehatan harian. Lebih jauh lagi, ketika partisipasi belajar menurun karena ketiadaan alat, *opportunity cost* bagi siswa untuk tetap "bersekolah" (namun tidak bisa belajar efektif) terasa jauh lebih tinggi dan sia-sia dibandingkan jika mereka putus sekolah untuk masuk ke sektor pekerja anak (*child labor*) demi menyambung hidup keluarga.

2. Jelaskan dampak kesenjangan digital terhadap kualitas pendidikan. Berikan solusi kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Jawaban :

Kesenjangan digital (*digital divide*) ini tidak sekadar menurunkan kualitas pendidikan, tetapi secara fundamental mengubah sistem pendidikan menjadi mesin pemilah kelas sosial yang sangat diskriminatif. Secara empiris, berkaca dari fenomena *Learning Loss* selama PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) di Indonesia, kebijakan digitalisasi buta ini membuahkan ketidakadilan distributif yang ekstrem: ia hanya mensubsidi dan mengakselerasi literasi digital siswa urban yang mapan, sementara jutaan siswa miskin mengalami kemunduran kognitif parah. Terjadi inefisiensi fatal dalam akumulasi *human capital* nasional karena potensi talenta dari kelompok bawah hangus sebelum sempat berkembang.

Sebagai rekomendasi kebijakan, pemerintah tidak bisa lagi sekadar mengandalkan kebijakan populis "bantuan kuota data" langsung ke nomor pribadi yang terbukti sarat dengan kebocoran anggaran dan *moral hazard* (digunakan untuk hiburan/game). Solusi yang jauh lebih efisien adalah pengadaan *device library* (perpustakaan gawai), di mana perangkat seperti tablet atau *chromebook* berstatus sebagai aset inventaris sekolah yang dipinjamkan secara bergilir untuk mencegah risiko dijual kembali oleh keluarga yang terdesak ekonomi. Selain itu, pemerintah pusat melalui regulasi ketat bukan sekadar himbauan CSR, harus memaksa oligarki provider telekomunikasi untuk memberlakukan *zero-rating* (akses gratis tanpa menyedot kuota) secara permanen terhadap semua domain portal pendidikan dan platform *e-learning* (termasuk *E-LKPD* berbasis web). Tentu, hambatan implementasi terbesarnya adalah resistensi dan lobi dari korporasi telekomunikasi yang enggan margin keuntungannya terpotong.